



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Okti : Mobnas Bukan Tanggung Jawab Saya

SELUMA - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma periode 2014-2019 Okti Fitriani, S.Pd, M.Si mengatakan, mobil dinas (Mobnas) yang digunakan dirinya saat menjabat sebagai pimpinan DPRD telah dikembalikan ke Sekretariat DPRD. Sehingga mobnas itu bukan lagi tanggung jawab dirinya untuk melakukan perbaikan. Karena Mobnas tersebut merupakan mobil jabatan yang digunakan dirinya saat tugas kemudian mengalami kecelakaan. Kemudian saat rapat koordinasi ke sekretaris daerahm diperintahkan akan dilakukan perbaikan. Setelah diperbaiki mobnas itu kemudian dilelang. "Jadi tidak lagi urusan saya pemegang mobil itu, Karena sudah diterima Sekretariat DPRD. Sehingga tidak ada persoalan, kalau soal kecelakaan siapa yang mau kecelakaan, tapi masih banyak mobil kecelakaan kok mobil yang saya gunakan ribet betul," kata Okti.

Sementara itu, terkait onderdil mobnas yang hilang, ia mengatakan bukan urusan dirinya karena dia sudah menyerahkan ke Sekretariat DPRD dalam kondisi lengkap. Meskipun rusak akibat kecelakaan. "Itu bukan urusan saya onderdil yang hilang, saya sudah menyerahkan dalam kondisi lengkap walaupun rusak, jadi bukan urusan saya hilang, hilang juga di sekretariat bukan urusan saya lagi," ujarnya.

Ia mengatakan, mobil tersebut merupakan mobil jabatan yang melekat sehingga merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk anggaran perbaikan dianggarkan di Sekretariat DPRD. "Intinya setiap mobil rusak diperbaiki, tanggung jawab pemer-

intah, masih tanggung jawab saya enak betul," tuturnya.

Sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Seluma telah menyurati Sekretariat DPRD. Hal ini, berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) RI pada Sekretariat DPRD, persolan aset mobil dinas eks Waka II yang menjadi temuan BPK. Namun hingga saat ini temuan tersebut belum kunjung ditindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau pengguna barang itu sendiri. Bahkan terkesan diabaikan lantaran hampir satu tahun tidak kunjung ditindak lanjuti.

"Kita sudah surati tapi sampai saat ini tidak ada laporan apakah sudah tindak lanjut atau belum," kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma Dedi Ramdhani.

Salah satu yang menjadi catatan dalam LHP OPD berkaitan pengelolaan aset kendaraan, kemudian harus membuktikan fisik kendaraan seperti semula dan apa bila onderdil tersebut hilang harus dikembalikan. Data terhimpun RB, seluruh onderdil yang terpasang di Mobnas tidak ada lagi saat terparkir di samping Sekretariat DPRD.

"Yang menjadi temuan terkait pengelolaan aset yang mendapat teguran, tapi sudah kita surati agar diperbaiki," kata Dedi.

Ia mengatakan, sudah tugas sekretariat DPRD menghadirkan bukti fisik kendaraan, jika pun hilang kewajiban sekretariat atau pengguna barang harus mengganti barang tersebut. "Intinya mereka harus membuktikan keberadaan kendaraan tersebut dan kondisi seperti semula," ujarnya. **(juu)**